

Erosi Budhi Pekerti

Global warming sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh banyak pihak, bahkan ada kecenderungan mencari kambing hitam. Terutama yang menerpa Wilayah Negara Republik Indonesia yang diandalkan sebagai paru-paru dunia dianggap sebagai salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Padahal bila memandang secara jujur bahwa Wilayah Indonesia sebagai Negara maritim dengan didalamnya mencakup beribu-ribu pulau tidak wajar bila terus dicerca dan didera oleh opini yang tidak bertanggung jawab. Kenapa demikian? Karena rusaknya gunung jadi gundul dan berakibat pada banjir, atau seringnya terjadi erosi bukan semata-mata dirusak oleh rakyat kecil. Tapi justru karena kebutuhan dunia luar yang memerlukan kayu Indonesia sebagai bahan industrinya. Dengan iming-iming penambahan devisa dari ekspor hasil hutan. Maka terjadilah perdagangan dunia tentang hasil-hasil hutan. Namun disayangkan setelah terjadi bencana. justru rakyat kecil yang dikambing hitamkan melakukan penebangan liar. Sehingga dimasukkan dalam jeruji besi. Tapi tidak terdengar penebangan resmi secara besar-besaran dipersoalkan sebab dianggap telah memenuhi prosedur.

Lantas berpikir! apakah benar yang mengakibatkan banjir dan pemanasan global diakibatkan oleh penebangan yang dilakukan rakyat kecil untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar sehariannya?, atau penebangan resmi untuk diekspor sebagai sumber devisa yang menjadi penyebab erosi dan banjir bandang!. Apakah adil bila pemanasan global ini dituduhkan karena gundulnya hutan Indonesia? Ataupun Benua-Benua lain yang sangat luas di hamparan alam semesta ini yang menjadi biang kerok pemanasan global karena menjadi Negara-negara industri besar. Disinilah harus berfikir secara arif dan bijaksana bahwa alam semesta ini bukan dituduh sebagai mala petaka tapi harus dijadikan hikmah bahwa kita mampu berfikir untuk bertahan hidup yang penuh tantangan. Sehingga muncul bhudi pekerti dari masing-masing bangsa sesuai dengan budaya yang berkembang dalam suatu wilayah.

Sedangkan terjadinya erosi bhudi pekerti adalah tuntutan keterbukaan, dengan munculnya informasi global yang tidak difilter secara cermat oleh keyakinan beragama serta keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Jadi jangan aneh bila anak sangat berani melawan kepada orang tua, jangan aneh bila anak buah selalu mengkritik dan menyudutkan para pemimpin sebagai biang kegagalan sebuah organisasi dengan jargon “ tidak ada prajurit yang salah”. Hal ini sebagai konsekwensi dari residu keterbukaan, globalisasi dan demokrasi yang kebablasan. Padahal di dalam Islam sudah jelas bila mengajak ke jalan Allah saja harus cara hikmah, bukan dengan cara demonstrasi, atau adu domba/saling tuntutan dimuka pengadilan. Dengan rujukan negara ”hukum”. Padahal filsafat hukum itu sendiri adalah musyawarah, ketenangan, kesepakatan, kekeluargaan secara hikmah ”*Ud’u illa sabili robbika bilhikmah*”. Jadi jangan aneh bila orang tua tidak tegas mendidik anak sebab takut dituntut oleh KDRT. Jangan aneh bila suami diadakan oleh istrinya ke pengadilan dengan tuntutan KDRT atau penganiayaan. Karena budhi pekerti sudah terkikis secara perlahan oleh ”ratifikasi hukum” yang penelitiannya dan penemuannya di negara yang berbeda sosiologinya, berbeda psikologinya, bahkan berbeda filosofinya.

Saat ini kekeluargaan sudah terkikis dengan jargon adu kebenaran terbuka di pengadilan. Bahkan melupakan pengadilan Allah yang akan membuktikan kebenaran yang hakiki. Disini tidak bisa saling menyalahkan karena situasi dan kondisi yang membuat penomena ini terjadi. Namun apa yang bisa dilakukan kedepan supaya bangsa Indonesia yang berbudi pekerti ini bisa pulih dan bangkit kembali sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga tidak semua persoalan dimasukan pada ranah hukum positif. Ingatlah masih ada hukum adat, hukum agama, dan sifat kekeluargaan yang bisa menjadi solusi kehidupan jadi tenang, ramah dan serasi dengan kebutuhan hidup serta kehidupan ini. Janganlah terbawa arus bahwa hanya hukum positif yang bisa menuntaskan semua persoalan hidup dan kehidupan ini. Jangan-jangan orang jadi frustrasi, apatis, serba salah, tidak kreatif bahkan jadi kalap menggunakan hukum rimba, karena tidak mampu beracara.

Sebenarnya budi pekerti itu bisa muncul bila rasa kekeluargaan tidak dianggap sebuah Kolusi, saling memberi itu tidak dianggap Korupsi, saling membantu tidak dianggap sebagai Nepotisme. Jadi jangan semua persoalan digiring menjadi ranah pemberantasan korupsi. Tapi kejahatan besar dan nyata-nyata merugikan orang banyak itulah yang harus ditertibkan dan uang/materi dari orang jahat harus dikembalikan kepada negara. Penulis bukan berarti tidak setuju dengan Pemberantasan KKN, bukan tidak setuju dengan penegakan hukum. Bahkan sangat setuju dengan *amar ma'ruf nahi munkar*. Namun semua individu tanpa kecuali harus memulai menanamkan budi pekerti dalam dirinya masing-masing. Sehingga niat dan kesempatan untuk berbuat salah dan jahat bisa terkendali. Bahkan semua orang harus bisa membedakan antara kesalahan dan kejahatan.

Orang yang melakukan kesalahan belum tentu diakibatkan oleh erosinya budi pekerti. Mungkin saja lupa, tidak tahu, keterbatasan penapsiran, adanya presur, berganti gangtinya aturan ataupun ciri dan sifat manusia itu "*al insanu mahalul khoto*". Tapi kalau kejahatan bisa dipastikan orang itu tidak punya budi pekerti. Karena orang jahat itu akan menghalalkan segala cara demi keuntungan dirinya sendiri. Apabila orang salah selalu dihukum bisa dimungkinkan orang tidak mau mencoba karena takut salah, orang tidak akan berpendapat karena takut salah, orang tidak akan mengeluarkan ide sebab takut salah, orang tidak akan bereksperimen karena takkut salah, orang tidak akan melakukan riset dan penelitian karena takut salah, orang tidak akan berani menulis karena takut salah. Bahkan mungkin orang tidak akan mengambil keputusan karena takut salah. Dikala orang takut menulis ide, gagasan dan hasil penelitiannya yang digali dan ditemukan dalam budaya, sosial, religi dan filosofi bangsa. Maka tidak akan ada jurnal ilmiah hasil karya sendiri. Dan bisa dipastikan jurnal dan literatur berbahasa Inggris dari baratlah yang akan digunakan.

Bila rajin mencermati dan mencoba meneliti, baik melalui survei, observasi atau kajian ilmiah dan kajian empirik, akan nampak bahwa budi pekerti dan kegotong royongan sudah tergerus oleh satu nilai-nilai baru yang diadopsi dari negara barat. Baik itu dibidang ekonomi, sosial, budaya, religi. Kenapa? karena para ilmuwan banyak merujuk pada liateratur negara barat yang dianggap lebih maju peradabannya. Bahkan para ilmuwan akan bangga bila literatur yang dijadikan rujukan berbahasa Inggris. Lupa bahwa karya ilmiah barat belum tentu bisa diterapkan di negara Republik Indonesia tercinta ini.

Misalnya sekarang sedang mengembangkan "*Corporation Social Responsibility*" (CSR). Setiap perusahaan harus punya tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar dengan metoda memberi uang. Tapi tanpa terjun langsung memberi contoh bersama-sama masyarakat sekitar. Sehingga muncul eksekutif luntur sikap kegotong royongan pada masyarakat setempat. Dan perusahaan itu merasa sudah berjasa bila sudah memberi kompensasi uang. Karena uang sudah dijadikan alat komoditi bukan lagi menjadi alat tukar. Sehingga kebutuhan masyarakat seolah-olah sudah cukup bila diganti dengan uang. Misal orang kena PHK dan butuh pekerjaan, bukan diberi pekerjaan pengganti malah diberi uang. Orang butuh pendidikan bukan diberikan pendidikan yang standar sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, tapi diberi uang dengan "BOS" sehingga guru yang tadinya harus ngajar jadi sibuk mengurus "BOS" dan *Block grant* dan berujung pada urusan jeruji besi, sebab tidak piawai dalam mengelola administrasi keuangan yang rumit. Sebab teori mengurus keuangan litelarnya dari barat sehingga sulit diimplementasikannya, karena beda latar belakang, beda pemahaman, beda komunitas, beda sipat, beda karakter, beda budayanya. Sehingga tidak sedikit orang "*nu teu mais teu meuleum*" harus berurusan dengan ranah hukum karena dianggap melanggar aturan dan berujung dengan jeruji besi.

Jadi dimana adanya budhi pekerti umat manusia Indonesia yang "*silih asah, silih asuh dan silih asih*". Dan tidak pantas pula saling menyalahkan, karena bila semua sudah masuk dalam nuansa saling menyalahkan dan saling membela dirinya masing-masing, maka yang terjadi adalah perang mempertahankan kebenaran dan keyakinannya masing-masing. Dalam situasi perang orang akan lupa bhudi pekerti, karena yang ada dibenaknya adalah membunuh atau dibunuh. Dan yang sedang terjadi saat ini adalah pembunuhan karakter. Bahkan dipertontonkan kepada publik melalui media yang sangat canggih dan cepat. Benarkan demokrasi yang sedang berjalan ini memperkuat bhudi pekerti atau malah mengajari publik untuk saling menyerang. Jika dikumpulkan uang penyelenggaraan pelaksanaan demokrasi dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pemilihan RT, RW, Kepala Desa, Bupati/Walikota, Gubernur, Presiden. Mungkin sudah bisa membangun pabrik yang bisa menyerap tenaga kerja puluhan juta orang. Apalagi dengan padat karya.

Jadi saat ini uang di setiap tingkatan dihambur-hamburkan hanya sekedar untuk membuktikan teori barat tentang tegak dan berdirinya demokrasi. Benarkah itu? Dan sesuaikah dengan yang dicontohkan oleh Rosulullah SAW? Mari semua merenung untuk menyemangati munculnya bhudi pekerti dan jatidiri bangsa yang sejati. Yang sudah hilang ditelan masa karena terlalu bangga dengan mengadopsi teori barat.